

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perpajakan Daerah dalam kegiatan pemungutan pajak dapat dilakukan secara elektronik dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, maka perlu mengubah Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 96) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
6. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
7. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
8. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

10. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disingkat NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak secara elektronik.
18. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas Objek Pajak yang bersifat unik, permanen dan nasional.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan secara Elektronik.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota secara elektronik.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang secara elektronik.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda secara elektronik.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan

Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
35. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
37. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
38. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
39. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
40. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan Lampiran SPOP atau e-SPOP dan e-Lampiran SPOP.
- (2) SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan Lampiran-lampiran pendukung dan disampaikan

kepada BPKAD atau tempat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP.

- (3) E-SPOP dan e-Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP atau e-SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
 - (5) Bentuk dan isi formulir SPOP dan e-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT dan e SPPT diatur sebagai berikut:

- a. berdasarkan SPOP atau e-SPOP, BPKAD dapat menerbitkan SPPT atau e-SPPT;
- b. SPPT atau e-SPPT diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal;
- c. SPPT dapat diterbitkan melalui pencetakan massal dan pencetakan dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan SPPT, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak;
- d. E-SPPT dapat diterbitkan melalui pencetakan massal dan pencetakan dalam rangka pelayanan meliputi pembuatan salinan e-SPPT, keberatan, pembetulan, pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak;
- e. tanda pengesahan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, menggunakan cap tanda tangan, cetakan tanda tangan baik secara manual maupun secara elektronik, atau *Quick Response Code (QR Code)*;
- f. tanda pengesahan e-SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik atau *Quick Response Code (QR Code)*;
- g. dalam hal Salinan SPPT PBB-P2 tanda pengesahan menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, harus dibubuhi dengan paraf basah Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang yang membawahnya;

- h. setiap tanggal 10 atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 10 merupakan hari libur, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah melaporkan penerbitan Salinan SPPT PBB-P2 bulan sebelumnya yang menggunakan cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan secara manual maupun secara elektronik atau *Quick Response Code (QR Code)* kepada Kepala Badan dengan menggunakan Daftar Penerbitan Salinan SPPT PBB-P2;
- i. pengesahan Salinan e-SPPT PBB-P2 dapat menggunakan Tanda Tangan elektronik atau *Quick Response Code (QR Code)*;
- j. SPPT PBB-P2 maupun e-SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh Kepala Badan;
- k. *Quick Response Code (QR Code)* mempunyai kekuatan setara dengan tanda tangan Kepala Badan sebagai tanda pengesahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
- l. BPKAD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 apabila melakukan pencetakan massal SPPT PBB-P2;
- m. sebelum SPPT PBB-P2 disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT PBB-P2 dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- n. penelitian SPPT PBB-P2 dilakukan bersama antara petugas BPKAD dan petugas Kelurahan;
- o. setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT PBB-P2 rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk BPKAD, rangkap ke-2 untuk Kelurahan, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian;
- p. SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT PBB-P2;
- q. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas BPKAD, petugas kelurahan dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan;
- r. kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT PBB-P2 secara berkala kepada BPKAD;
- s. SPPT harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat tanggal 30 Juni;
- t. E-SPPT yang diterbitkan BPKAD dapat diunduh Wajib Pajak lewat aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- u. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP untuk mengetahui informasi NJOP, tapi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran PBB-P2 sebagaimana SPPT atau e-SPPT;

- v. pengesahan Surat Keterangan NJOP ditandatangani oleh Kepala Badan dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, menggunakan cap tanda tangan, cetakan tanda tangan baik secara manual maupun secara elektronik, atau *Quick Response Code (QR Code)*; dan
- w. bentuk, dan isi formulir SPPT dan e-SPPT sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tahapan penerbitan dan penyampaian SKPD atau e-SKPD diatur sebagai berikut :

- a. apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP atau e-SPOP atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar, maka ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Badan dengan diterbitkan SKPD atau e-SKPD;
- b. SKPD atau e-SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai;
- c. SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
- d. E-SKPD yang diterbitkan BPKAD diunduh Wajib Pajak lewat aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. bentuk dan isi formulir SKPD dan e-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Kas Daerah atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk berdasarkan SPPT, e-SPPT, SKPD, e-SKPD, STPD dan e-STPD.
- (2) Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

- a. tempat pembayaran yang ditunjuk yang dapat mencetak SSPD atau e-SSPD; dan
- b. tempat pembayaran yang ditunjuk yang menerbitkan resi/struk sebagai bukti pembayaran yang sah.

(4) Bentuk dan format SSPD dan e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tahapan penerbitan dan penyampaian STPD atau e-STPD diatur sebagai berikut :

- a. BPKAD menerbitkan STPD atau e-STPD apabila Pajak yang terutang :
 1. tidak atau kurang dibayar;
 2. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan hitung dan atau tulis; dan
 3. terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat adanya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- b. STPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BPKAD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterbitkan;
- c. E-STPD yang diterbitkan BPKAD diunduh Wajib Pajak lewat aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bentuk dan isi formulir STPD dan e-STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang atau yang tercantum dalam SPPT, e-SPPT, SKPD, e-SKPD, STPD, dan e-STPD.

- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, e-SPPT, SKPD, e-SKPD, STPD, dan e-STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 149

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

BENTUK DAN ISI FORMULIR SPOP DAN e-SPOP

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No :
No. formulir

Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir)
diisi oleh wajib pajak
beri tanda silang (x) pada kolom yang sesuai

1 JENIS TRANSAKSI

☐ 1 Perekaman Data

☐ 2 Pemutakhiran Data

☐ 3 Penghapusan Data

2 NOP

PRKotaKecKelBlokNo. UrutKode

3 NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4 NOP ASAL

5 NO. SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBYEK

6 NAMA JALAN

7 BLOK/KAV/NOMOR

8 KELURAHAN

9. RW

10. RT

C. DATA SUBYEK PAJAK

11. STATUS

☐ 1. Pemilik☐ 2. Penyewa☐ 3. Pengelola☐ 4. Pemakai☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN

☐ 1. PNS *)☐ 2. ABRI *)☐ 3. Pensiunan *)☐ 4. Badan☐ 5. Lainnya

13 NAMA SUBYEK PAJAK

14 NPWP

15 NAMA JALAN

16 BLOK/KAV/NOMOR

17 KELURAHAN

18. RW

19. RT

20 KOTA / KABUPATEN

21. KODE POS

21 NO. KTP / IDENTITAS LAINNYA

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH M2

23. ZONA NILAI TANAH

23. JENIS TANAH

☐ 1. Tanah +
Bangunan☐ 2. Kavling
Siap Bangun☐ 3. Tanah
Kosong☐ 4. Fasilitas
Umum

Catatan : *) Yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|---|--|------|--|---------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK | | | | | | | | | | No. formulir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. JENIS TRANSAKSI | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1 Perekaman Data | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2 Pemutakhiran Data | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3 Penghapusan Data | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4 Penilaian Individu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. NOP | | | | | | | | | | PR | | Kota | | Kec | | Kel | | Blok | | No. Urut | | Kode | | 3. JUMLAH BNG | | | | | | | | | | 4. BANGUNAN KE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. RINCIAN DATA BANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. JENIS TRANSAKSI | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1 Perumahan | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2 Perkantoran | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3 Pabrik | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4 Toko/Apotik/Pasar/Ruko | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 5 Rumah Sakit/Klinik | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 6 Olah raga /Rekreasi | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 7 Hotel/Wisata | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 8 Bengkel/Gudang/Pertanian | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 9 Gedung Pemerintah | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 10 Lain-lain | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 11 Bangunan Tidak Kena Pajak | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 12 Bangunan Parkir | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 13 Apartemen | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 14 Pompa Bensin | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 15 Tangki Minyak | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 16 Gedung Sekolah | | | | | | | | | |
| 6. LUAS BANGUNAN (M2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7. JUMLAH LANTAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. TAHUN DI BANGUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9. DAYA LISTRIK TERPASANG (watt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. TAHUN DIRENOVASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. KONDISI PADA UMUMNYA | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Baik | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Sedang | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4. Jelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. KONTRUKSI | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Baja | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Beton | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4. Kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. ATAP | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Dekrabon / Beton/Gtg Glazur | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton Alumunium | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Gtg biasa Sirap | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4. Asbes | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 5. Seng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. DINDING | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Kaca/Alumunium | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Beton | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata Conblok | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4. Kayu | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 5. Seng | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 5. Tdk ada Diniding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. LANTAI | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Marmer | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Keramik | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Teraso | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC Papan | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 5. Semen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. LANGIT-LANGIT | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asber Bambu | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. FASILITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 JUMLAH AC | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Split | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> Windows | | | | | | | | | | 18. AC SENTRAL | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Ada | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. LUAS KOLAM RENANG (m2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (m2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ringan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dgn Penu tup Lantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS | | | | | | | | | | Dgn Lampu | | | | | | | | | | Tanpa Lampu | | | | | | | | | | 22. JUMLAH LIFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lebar ≤ 0,80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lebar ≥ 0,80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. PANJANG PAGAR (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAHAN PAGAR | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako | | | | | | | | | | 25. PEMADAM KEBAKARAN | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Hidrant | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Ada | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Tdk Ada | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 2.Sprinkler | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Ada | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Tdk Ada | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 3. Fire AI | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Ada | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 1. Tdk Ada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. JUMLAH SALURAN PES PABX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div><div></div><div>PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3/8)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. TINGGI KOLOM (M) | | | | | <div><div></div><div></div></div> | | | | | 29. LEBAR BENTANG (M) | | | | | <div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. DAYA DUKUNG LANTAI (KG/M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 31. KELILING DIDING (M) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 32. LUAS MEZZANINE (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | |
| D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/8)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. DAYA DUKUNG | | | | | <div><div></div>1. KELAS 1</div> | | | | | <div><div></div>2. KELAS 2</div> | | | | | <div><div></div>3. KELAS 3</div> | | | | | <div><div></div>4. KELAS 4</div> | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. KELAS BANGUNAN | | | | | <div><div></div>1. KELAS 1</div> | | | | | <div><div></div>2. KELAS 2</div> | | | | | <div><div></div>3. KELAS 3</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. KELAS BANGUNAN | | | | | <div><div></div>1. KELAS 1</div> | | | | | <div><div></div>2. KELAS 2</div> | | | | | <div><div></div>3. KELAS 3</div> | | | | | <div><div></div>4. KELAS 4</div> | | | | | | | | | |
| 36. LUAS KAMAR DGN AC SENTAL (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 37. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTAL (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>OLAHRAGA / REKREASI (JPB = 6)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. KELAS BANGUNAN | | | | | <div><div></div>1. KELAS 1</div> | | | | | <div><div></div>2. KELAS 2</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>HOTEL / WISMA (JPB = 7)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. JENIS HOTEL | | | | | <div><div></div>1. Non Resort</div> | | | | | <div><div></div>2. Resort</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. JUMLAH BINTANG | | | | | <div><div></div>1. Bintang 5</div> | | | | | <div><div></div>2. Bintang 4</div> | | | | | <div><div></div>3. Bintang 3</div> | | | | | <div><div></div>4. Bintang 1-2</div> | | | | | <div><div></div>5. Non Bintang</div> | | | | |
| 41. JUMLAH KAMAR | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 42. LUAS KAMAR DGN AC SENTAL (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 43. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTAL (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | |
| <div><div></div><div>BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. TIPE BANGUNAN | | | | | <div><div></div>1. Tipe 4</div> | | | | | <div><div></div>2. Tipe 3</div> | | | | | <div><div></div>3. Tipe 2</div> | | | | | <div><div></div>4. Tipe 1</div> | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>APARTEMEN (JPB = 13)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. KELAS BANGUNAN | | | | | <div><div></div>1. KELAS 1</div> | | | | | <div><div></div>2. KELAS 2</div> | | | | | <div><div></div>3. KELAS 3</div> | | | | | <div><div></div>4. KELAS 4</div> | | | | | | | | | |
| 46. JUMLAH APARTEMEN | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 47. LUAS APARTEMEN DGN AC SENTAL (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 48. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTAL (M2) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | |
| <div><div></div><div>TANGKI MINYAK (JPB = 15)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. KAPASITAS TANGKI (M3) | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 50. LETAK TANGKI | | | | | <div><div></div>1. DIATAS TANAH</div> | | | | | <div><div></div>2. DIBAWAH TANAH</div> | | | | | | | | | |
| <div><div></div><div>GEDUNG SEKOLAH (JBB = 16)</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. KELAS BANGUNAN | | | | | <div><div></div>1. KELAS 1</div> | | | | | <div><div></div>2. KELAS 2</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PENILAIAN INDIVIDU (X 1.000 Rp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. KAPASITAS TANGKI | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 53. KAPASITAS TANGKI | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | |
| F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PETUGAS PENDATA | | | | | | | | | | MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. KAPASITAS TANGKI | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 59. TANGGAL PENELITIAN | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. KAPASITAS TANGKI | | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | 60. TANDA TANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. TANDA TANGAN | | | | | | | | | | 61. NAMA JELAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. NAMA JELAS | | | | | | | | | | 62. NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ELEKTRONIK (e-SPOP)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**e-SPOP
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
ELEKTRONIK**

No. formulir

No. :

Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir)
Diisi oleh wajib pajak
beri tanda silang (x) pada kolom yang sesuai

1 JENIS TRANSAKSI

☐ 1 Perekaman Data

☐ 2 Pemutakhiran Data

☐ 3 Penghapusan Data

2 NOP

PR

Kota

Kec

Kel

Blok

No. Urut

Kode

3 NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4 NOP ASAL

5 NO. SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBYEK

6 NAMA JALAN

7 BLOK/KAV/NOMOR

8 KELURAHAN

9. RW

10. RT

C. DATA SUBYEK PAJAK

11. STATUS

☐

1. Pemilik

☐

2. Penyewa

☐

3. Pengelola

☐

4. Pemakai

☐

5. Sengketa

12. PEKERJAAN

☐

1. PNS *)

☐

2. ABRI *)

☐

3. Pensiunan *)

☐

4. Badan

☐

5. Lainnya

13 NAMA SUBYEK PAJAK

14 NPWP

15 NAMA JALAN

16 BLOK/KAV/NOMOR

17 KELURAHAN

18. RW

19. RT

20 KOTA / KABUPATEN

21. KODE POS

21 NO. KTP/IDENTITAS LAINNYA

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH M2

23. ZONA NILAI TANAH

23. JENIS TANAH

☐

1. Tanah +
Bangunan

☐

2. Kavling
Siap Bangun

☐

3. Tanah
Kosong

☐

4. Fasilitas
Umum

Catatan : *) Yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

D. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ELEKTRONIK (e-LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ELEKTRONIK

e-LSPOP

No. formulir

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| 1. JENIS TRANSAKSI | <input type="checkbox"/> 1 Perekaman Data | <input type="checkbox"/> 2 Pemutakhiran Data | <input type="checkbox"/> 3 Penghapusan Data |
| | <input type="checkbox"/> 4 Penilaian Individu | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|------|-----|-----|------|----------|------|----------------|--|
| 2. NOP | PR | Kota | Kec | Kel | Blok | No. Urut | Kode | 3. JUMLAH BNG | |
| | | | | | | | | 4. BANGUNAN KE | |

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 5. JENIS TRANSAKSI | <input type="checkbox"/> 1 Perumahan | <input type="checkbox"/> 2 Perkantoran | <input type="checkbox"/> 3 Pabrik |
| | <input type="checkbox"/> 4 Toko/Apotik/Pasar/Ruko | <input type="checkbox"/> 5 Rumah Sakit/Klinik | <input type="checkbox"/> 6 Olah raga /Rekreasi |
| | <input type="checkbox"/> 7 Hotel/Wisata | <input type="checkbox"/> 8 Bengkel/Gudang/Pertanian | <input type="checkbox"/> 9 Gedung Pemerintah |
| | <input type="checkbox"/> 10 Lain-lain | <input type="checkbox"/> 11 Bangunan Tidak Kena Pajak | <input type="checkbox"/> 12 Bangunan Parkir |
| | <input type="checkbox"/> 13 Apartemen | <input type="checkbox"/> 14 Pompa Bensin | <input type="checkbox"/> 15 Tangki Minyak |
| | <input type="checkbox"/> 16 Gedung Sekolah | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 6. LUAS BANGUNAN (M2) | | 7. JUMLAH LANTAI | |
| 8. TAHUN DI BANGUN | | 9. DAYA LISTRIK TERPASANG (watt) | |
| 10. TAHUN DIRENOVASI | | | |
| 11. KONDISI PADA UMUMNYA | <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik | <input type="checkbox"/> 2. Baik | <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek |
| 12. KONTRUKSI | <input type="checkbox"/> 1. Baja | <input type="checkbox"/> 2. Beton | <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu |
| 13. ATAP | <input type="checkbox"/> 1. Dekrabon / Beton/Gtg Glazur | <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton Alumunium | <input type="checkbox"/> 3. Gtg biasa Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng |
| 14. DINDING | <input type="checkbox"/> 1. Kaca/Alumunium | <input type="checkbox"/> 2. Beton | <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 5. Tdk ada Diniding |
| 15. LANTAI | <input type="checkbox"/> 1. Marmer | <input type="checkbox"/> 2. Keramik | <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen |
| 16. LANGIT-LANGIT | <input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati | <input type="checkbox"/> 2. Triplek/ Asber Bambu | <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada |

B. FASILITAS

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| 17 JUMLAH AC | <input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Windows | 18. AC SENTRAL | <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada |
| 19. LUAS KOLAM RENANG (m2) | <input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dgn Pelapis | 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (m2) | <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dgn Penu tup Lantai |
| 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS | Dgn Lampu Tanpa Lampu <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput | 22. JUMLAH LIFT | 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN <input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Tanah Liat Lebar ≤ 0,80 m <input type="checkbox"/> Lebar ≥ 0,80 m <input type="checkbox"/> |
| 24. PANJANG PAGAR (m) | <input type="checkbox"/> BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako | 25. PEMADAM KEBAKARAN | <input type="checkbox"/> 1. Hidrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tdk Ada <input type="checkbox"/> 2.Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tdk Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tdk Ada |
| 26. JUMLAH SALURAN PES PABX | <input type="checkbox"/> | 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (m) | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <div><div></div><div>PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3/8)</div><div>28. TINGGI KOLOM (M)</div><div>30. DAYA DUKUNG LANTAI (KG/M2)</div></div> | <div><div></div><div>29. LEBAR BENTANG (M)</div><div>31. KELILING DIDING (M)</div></div> | <div><div></div><div>32. LUAS MEZZANINE (M2)</div></div> | | |
| D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR | | | | |
| <div><div></div><div>PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/8)</div><div>33. DAYA DUKUNG</div></div> | <div><div></div><div>1. KELAS 1</div></div> | <div><div></div><div>2. KELAS 2</div></div> | <div><div></div><div>3. KELAS 3</div></div> | <div><div></div><div>4. KELAS 4</div></div> |
| <div><div></div><div>TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)</div><div>34. KELAS BANGUNAN</div></div> | <div><div></div><div>1. KELAS 1</div></div> | <div><div></div><div>2. KELAS 2</div></div> | <div><div></div><div>3. KELAS 3</div></div> | |
| <div><div></div><div>RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)</div><div>35. KELAS BANGUNAN</div><div>36. LUAS KAMAR DGN AC SENTAL (M2)</div></div> | <div><div></div><div>1. KELAS 1</div></div> | <div><div></div><div>2. KELAS 2</div></div> | <div><div></div><div>3. KELAS 3</div></div> | <div><div></div><div>4. KELAS 4</div><div>37. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTAL (M2)</div></div> |
| <div><div></div><div>OLAHRAGA / REKREASI (JPB = 6)</div><div>38. KELAS BANGUNAN</div></div> | <div><div></div><div>1. KELAS 1</div></div> | <div><div></div><div>2. KELAS 2</div></div> | | |
| <div><div></div><div>HOTEL / WISMA (JPB = 7)</div><div>39. JENIS HOTEL</div><div>40. JUMLAH BINTANG</div><div>41. JUMLAH KAMAR</div></div> | <div><div></div><div>1. Non Resort</div><div>1. Bintang 5</div></div> | <div><div></div><div>2. Bintang 4</div></div> | <div><div></div><div>2. Resort</div><div>3. Bintang 3</div></div> | <div><div></div><div>4. Bintang 1-2</div><div>5. Non Bintang</div><div>43. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTAL (M2)</div></div> |
| <div><div></div><div>BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)</div><div>44. TIPE BANGUNAN</div></div> | <div><div></div><div>1. Tipe 4</div></div> | <div><div></div><div>2. Tipe 3</div></div> | <div><div></div><div>3. Tipe 2</div></div> | <div><div></div><div>4. Tipe 1</div></div> |
| <div><div></div><div>APARTEMEN (JPB = 13)</div><div>45. KELAS BANGUNAN</div><div>46. JUMLAH APARTEMEN</div></div> | <div><div></div><div>1. KELAS 1</div></div> | <div><div></div><div>2. KELAS 2</div></div> | <div><div></div><div>3. KELAS 3</div></div> | <div><div></div><div>4. KELAS 4</div><div>48. LUAS RUANG LAIN DGN AC SENTAL (M2)</div></div> |
| <div><div></div><div>TANGKI MINYAK (JPB = 15)</div><div>49. KAPASITAS TANGKI (M3)</div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div><div>50. LETAK TANGKI</div></div> | <div><div></div><div>1. DIATAS TANAH</div></div> | <div><div></div><div>2. DIBAWAH TANAH</div></div> |
| <div><div></div><div>GEDUNG SEKOLAH (JBB = 16)</div><div>51. KELAS BANGUNAN</div></div> | <div><div></div><div>1. KELAS 1</div></div> | <div><div></div><div>2. KELAS 2</div></div> | | |
| E. PENILAIAN INDIVIDU (X 1.000 Rp.) | | | | |
| <div><div></div><div>52. KAPASITAS TANGKI</div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div><div>53. KAPASITAS TANGKI</div></div> | <div><div></div></div> | |
| F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG | | | | |
| PETUGAS PENDATA | | MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG | | |
| <div><div></div><div>54. KAPASITAS TANGKI</div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div><div>59. TANGGAL PENELITIAN</div></div> | <div><div></div></div> | |
| <div><div></div><div>55. KAPASITAS TANGKI</div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div><div>60. TANDA TANGAN</div></div> | <div><div></div></div> | |
| <div><div></div><div>56. TANDA TANGAN</div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div><div>61. NAMA JELAS</div></div> | <div><div></div></div> | |
| <div><div></div><div>57. NAMA JELAS</div></div> | <div><div></div></div> | <div><div></div><div>62. NIP</div></div> | <div><div></div></div> | |
| <div><div></div><div>58. NIP</div></div> | <div><div></div></div> | | | |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi BPKAD Kota Yogyakarta.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo

| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK | |
| SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN..... | | AKUN: | |
| NOP : | | | |
| LETAK OBJEK PAJAK | | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | |
| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 (Rp) |
| | | TOTAL NJOP (Rp) | |
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : NJOP untuk perhitungan PBB : PBB yang Terutang : | | | |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) | | | |
| TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : | | KEPALA | |
| NAMA WP : LETAK OBJEK PAJAK : Kecamatan NOP : SPPT TAHUN/Rp. : | | Diterima tgl Tanda Tangan (.....) Nama Terang | |

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi BPKAD Kota Yogyakarta.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan, b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BPKAD Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) diterimanya SPPT ini,
 - b) terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Bates waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BPKAD Kota Yogyakarta.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 7 ayat 3.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DENGAN QR CODE

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN.....

AKUN:

NOP :

| | | | | |
|--|-----------|--|------------------|-----------------|
| LETAK OBJEK PAJAK | | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | | |
| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) |
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : NJOP untuk perhitungan PBB : PBB yang Terutang : | | | | |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) | | | | |
| TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN : | | KEPALA <div>QR CODE</div> | | |
| NAMA WP : LETAK OBJEK PAJAK : NOP : SPPT TAHUN/Rp. : | | Diterima tgl Tanda Tangan (.....) Nama Terang | | |

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi BPKAD Kota Yogyakarta.

2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.

3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.

4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :

a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut

b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.

5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.

6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :

a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan,

b) ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BPKAD Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.

8. Permohonan pengurusan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :

a) diterimanya SPPT ini,

b) terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.

10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BPKAD Kota Yogyakarta.

12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 7 ayat 3.

13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ELEKTRONIK (e-SPPT)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ELEKTRONIK TAHUN.....
(e-SPPT PBB)

AKUN:

NOP :

| | | | | | |
|--|-----------|-------|-----------------------------|-----------------|--|
| LETAK OBJEK PAJAK | | | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | | |
| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) | |
| NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : NJOP untuk perhitungan PBB : PBB yang Terutang : | | | | | |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) | | | | | |
| TGL. JATUH TEMPO : | | | KEPALA | | |
| TEMPAT PEMBAYARAN : | | | <div>QR CODE</div> | | |

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi BPKAD Kota Yogyakarta.

2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.

3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.

4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.

5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.

6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan, ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BPKAD Kota Yogyakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.

8. Permohonan pengurusan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
a) diterimanya SPPT ini,
b) terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.

10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

11. Apabila objek pajak dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BPKAD Kota Yogyakarta.

12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 7 ayat 3.

13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

BENTUK DAN ISI FORMULIR SKPD DAN e-SKPD

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

| | | | | |
|--|------|--|--|-----------------------|
| PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835 | | SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Tahun : | | NO. SKPD |
| Nama : Alamat : NOP : Tanggal : | | | | |
| No | Ayat | Jenis Pajak Daerah | | Jumlah Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga | | |
| | | b. Kenaikan | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | | |
| Dengan huruf | | <div></div> | | |
| PERHATIAN : | | | | |
| 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). | | | | |
| 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan | | | | |
| Yogyakarta tahun..... An. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah (.....) NIP. | | | | |
| TANDA TERIMA | | No. SKPD | | |
| NOP : NAMA : ALAMAT : | | Yogyakarta, Tahun Yang menerima, (.....) | | |

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SKPD)

| | | | | |
|--|------|---|--|-----------------------|
| PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835 | | e-SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK) Tahun : | | NO. SKPD |
| Nama : Alamat : NOP : Tanggal : | | | | |
| No | Ayat | Jenis Pajak Daerah | | Jumlah Rp. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak | | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga | | |
| | | b. Kenaikan | | |
| | | Jumlah Keseluruhan | | |
| Dengan huruf | | <div></div> | | |
| PERHATIAN : | | | | |
| 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). | | | | |
| 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. | | | | |
| Yogyakarta tahun..... | | | | |
| An. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah | | | | |
| <div>QR Code</div> | | | | |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

BENTUK DAN FORMAT SSPD DAN e-SSPD

A. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD PBB)

PERHATIAN

SSPD merupakan bukti pembayaran PBB yang sah.
untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah
SSPD dengan baik.

SSPD merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SSPD dengan baik.

B. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SSPD)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK

(e-SSPD)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB th :dari :

Nama Wajib Pajak :

Letak objek pajak :

Kec :

Kel :

No. SSPD (NOP) :

Sejumlah :

Tanggal Jatuh Tempo :

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada setelah tanggal jatuh tempo

Pokok :

Denda :

Total :

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang harus dibayar :

QR CODE

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 148 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

BENTUK DAN ISI FORMULIR STPD DAN e-STPD

A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

| | | |
|---|--|-------------------|
| PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835 | SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STPD PBB) TAHUN | No. Urut |
| Nama : Alamat : N.O.P. : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Tanggal jatuh tempo : | | |
| I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : N.O.P. : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi Bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp. | | |
| Dengan huruf <div></div> | | |
| PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) 2. Apabila STPD PBB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo STPD PBB ini maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan | | |
| Yogyakarta,,..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah NIP | | |
|Gunting disini | | |
| Nomor STPD PBB | | |
| TANDA TERIMA | | |
| NPWPD : Nama : Alamat : | Yogyakarta,,..... Yang menerima (Nama jelas) | |

B. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-STPD)

| | | |
|--|--|--------------------------|
| PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835 | SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ELEKTRONIK (e-STPD PBB) TAHUN | No. Urut |
| Nama : Alamat : N.O.P. : Tanggal jatuh tempo : | | |
| I. Berdasarkan Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : N.O.P. : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi Rp. Bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp. | | |
| Dengan huruf | | |
| PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (SSPD PBB) 2. Apabila STPD PBB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo STPD PBB ini maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan | | |
| Yogyakarta,,..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah <div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 5px;"> QR CODE </div> | | |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI